

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Partai Golongan Karya merupakan partai yang besar dan memiliki sejarah dan dinamika yang Panjang dalam perpolitikan di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai perubahan dukungan atau koalisi Partai Golongan Karya dari Prabowo ke Jokowi pada kontestasi pemilihan Presiden tahun 2014, Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Model Koalisi Partai Golongan Karya pada Pilpres 2014

Model koalisi Partai Golongan Karya pada tahun 2014 yang terlihat menggunakan model koalisi Policy Blind Coalitions Theory dengan mengedepankan pendekatan *office-seeking* untuk melakukan koalisi dengan KMP bersama Prabowo-Hatta : Menekankan prinsip ukuran dan jumlah kursi partai politik pada parlemen, Berkoalisi dengan Koalisi Merah Putih dengan partai-partai politik besar : Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS dan Partai Demokrat, dengan jumlah suara kursi di parlemen 353 atau 63%; Pendekatan berbasis *office-seeking* untuk memaksimalkan kekuasaan, Terlihat pada adanya bargaining Partai Golongan Karya, ketika berusaha menentukan koalisi ke KMP atau KIH. Pada saat ke KIH bertemu dengan Megawati, adanya penolakan bargaining. Kemudian, ketika ke KMP bertemu dengan Prabowo, adanya kesepakatan bargaining yang sesuai dengan kehendak dan keinginan Partai

Golongan Karya, sebagai partai besar dan memiliki eksistensi yang besar dari periode ke periode, sehingga tidak menginginkan minimal bargaining untuk memaksimalkan kekuasaan dan kedudukan di pemerintahan; Loyalitas peserta koalisi sulit dijamin, Ketika hasil pemilihan presiden telah menentukan kemenangan pada Jokowi-JK dengan koalisi KIH, maka terjadinya perpindahan dan perubahan dukungan Partai Golongan Karya dari Prabowo dengan koalisi KMP ke Jokowi dengan koalisi KIH, untuk melanggengkan kekuasaan Partai Golongan Karya dalam pusaran pemerintahan, sehingga terjadilah bargaining Partai Golongan Karya dengan Jokowi pada tahun 2016 pasca MUNASLUB Partai Golongan Karya.

Konflik internal partai Golongan Karya karena perbedaan sikap politik adalah satu penyebab utama konflik adalah perbedaan sikap politik di dalam partai terhadap hasil pemilihan presiden 2014. Beberapa anggota partai mendukung Prabowo, sementara yang lain lebih condong kepada Jokowi, menciptakan ketegangan antara kubu-kubu yang berbeda. Ada kepentingan individual dan kelompok dalam partai yang tidak terakomodasi secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan anggota partai, yang pada gilirannya memperburuk perpecahan dan menciptakan dualisme dalam kepemimpinan. koalisi pra dan pasca pilpres konflik ini juga berakar dari perubahan strategi koalisi. Golkar awalnya berkoalisi dengan Prabowo, tetapi setelah hasil pemilihan, terdapat tekanan untuk beradaptasi dengan pemerintahan Jokowi, yang membuat beberapa anggota merasa bahwa keputusan tersebut merupakan pengkhianatan atas dukungan awal mereka.

Dinamika internal dan manajemen yang buruk, dinamika internal partai yang tidak dikelola dengan baik dapat menghasilkan ketegangan yang signifikan. Ketidakmampuan untuk menjalin komunikasi dan kesepakatan di antara berbagai kubu di dalam partai menjadi salah satu pemicu hebatnya konflik internal. Citra dan persepsi public, konflik yang terjadi berpotensi merusak citra partai di mata publik. Partai yang terlibat konflik sering kali dianggap tidak stabil dan tidak dapat memberikan kepemimpinan yang solid, yang menyebabkan pemilih dan elite politik lainnya menjadi ragu untuk berkoalisi dengan Golkar. Perubahan kepemimpinan dan ambisi kekuasaan, ambisi individu dalam kepemimpinan partai dan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan juga berkontribusi terhadap terjadinya konflik. Persaingan untuk posisi dan kekuasaan dalam internal partai seringkali memicu perpecahan dan pertikaian.

2. Perubahan Dukungan Partai Golongan Karya dari Prabowo ke Jokowi

Perubahan dukungan Partai Golongan Karya dari Prabowo ke Jokowi dikarenakan Golkar merasa lebih nyaman untuk berafiliasi dengan pemerintahan Jokowi yang baru, karena didalam pilpres ini juga masih terdapat tokoh Golkar yaitu Jusuf Kalla . Kemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 memaksa Golkar untuk mempertimbangkan kembali posisinya. Setelah melihat hasilnya, dukungan kepada Jokowi dinilai lebih strategis untuk mempertahankan posisi dan pengaruh Golkar dalam struktur pemerintahan

yang baru. Golkar cenderung mengutamakan stabilitas dan visi jangka panjang dalam politik. Dengan berkoalisi dengan Jokowi, Golkar berupaya memastikan bahwa mereka tetap memiliki akses dan pengaruh dalam pengambilan keputusan politik, meskipun mereka awalnya mendukung lawan politik Jokowi. Suasana politik di dalam Golkar sendiri mengalami perubahan, dualisme internal partai dan kebutuhan untuk menyatukan suara di dalam partai mendorong Golkar untuk mendukung pemerintahan yang sudah terpilih, demi menjaga citra dan koherensi partai. Partai Golkar berambisi untuk tetap relevan di panggung politik nasional. Keputusan untuk mendukung Jokowi lebih dianggap sebagai langkah pragmatis untuk menciptakan peluang dalam mendapatkan posisi yang strategis di pemerintahan serta untuk memenuhi aspirasi anggota partai yang ingin berpartisipasi dalam kekuasaan.

3. Faktor-Faktor Yang Mendukung Perubahan Dukungan Partai Golongan Karya dari Prabowo ke Jokowi

a. Perbedaan sikap politik di internal Partai Golongan Karya

Terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan di antara anggota partai yang menyebabkan ketidakpuasan terhadap keputusan awal untuk mendukung Prabowo. Hal ini memicu konflik internal yang dimana Sebagian kader Golkar memilih untuk mendukung Jokowi-JK, yang didalam pasangan ini JK masih merupakan tokoh Golkar yang memiliki pengaruh besar.

b. Situasi Politik Pasca-Pilpres

Pasca Pilpres dan pasca MUNASLUB Partai Golkar pada tahun 2016, dan dengan terpilihnya Setya Novanto pada MUNASLUB tersebut sebagai Ketua Umum Partai Golkar, hasil MUNASLUB juga memberikan sikap politik Partai Golkar bahwa mendukung penuh pemerintahan Jokowi-JK dan berkoalisi dengan KIH. Disisi lain, Jokowi Ds sebagai pemenang Pilpres, menjadi dorongan kuat bagi Golkar untuk menyesuaikan diri dan mencari posisi strategis dalam pemerintahan baru dan mengamankan peran dan pengaruh Partai Golkar dalam kekuasaan pemerintahan.

c. Konsensus Internal Partai Golongan Karya

Proses konsensus di dalam partai setelah hasil Munaslub 2016 mendukung Jokowi sebagai calon presiden untuk pilpres 2019, menunjukkan bahwa partai memilih untuk bersikap proaktif dalam pemerintahan saat itu. Hal ini mencerminkan upaya partai untuk memperkuat posisinya dan menjalin hubungan baik dengan pemerintahan yang sedang berkuasa.

d. Keinginan untuk Memaksimalkan Kebijakan

Terdapat pandangan bahwa Golkar lebih memfokuskan diri pada keberlanjutan kebijakan untuk masyarakat daripada sekadar mengejar kekuasaan. Hal ini mendorong mereka untuk menjalin hubungan dengan pemerintah Jokowi yang dianggap lebih sejalan dengan tujuan partai.

6.2 Saran-saran

Saran-saran dalam hasil penelitian ini guna memberikan kontribusi terhadap ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan yang relevan dengan terjadinya perubahan dukungan dan koalisi Partai Golongan Karya dalam Pilpres tahun 2014, serta saran praktis guna memberikan manfaat bagi praktisi politik, sebagai berikut :

6.2.1 Saran Akademik

1. Riset terkait model koalisi partai politik di Indonesia perlu diperluas, sehingga memberikan sumbangsih kepada praktisi dan peneliti untuk melihat dinamika dan perubahan koalisi partai politik di Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya mampu mengembangkan mengenai model koalisi dan perubahan dukungan partai politik di Indonesia, khususnya dalam konteks di Indonesia yang menganut sistem kepartaian multipartai.

6.2.2 Saran Praktis

1. Partai politik harus mampu menentukan koalisi dengan optimal, tidak hanya semata-mata untuk memperhatakan kekuasaan, akan tetapi juga koalisi yang dibangun harus mampu memiliki afiliasi positif dalam konteks kebijakan masyarakat.
2. Meminimalisir konflik internal partai politik di Indonesia sebagai tanggung-jawab bersama bagi kader partai politik, sebab akan menentukan arah kebijakan dan posisi partai politik itu sendiri untuk masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, mampu memberikan saran praktis yang lebih efektif untuk pengembangan studi partai politik Indonesia.